



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI



PROFIL GENDER DER

KOTA JAMBI TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan buku “ Profil Gender Kota Jambi Tahun 2024”.

Profil Gender Kota Jambi tahun 2024 menyajikan data capaian pembangunan di Kota Jambi. Diharapkan buku ini dapat menjadi instrument serta referensi bagi pemerintah maupun, Lembaga serta mitra dalam menyusun perencanaan dan program sehingga pembangunan di Kota Jambi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat di Kota Jambi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, sumbangan pemikiran yang korektif dan konstruktif serta kerjasama yang sinergis sangat diperlukan demi penyempurnaan buku ini. Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat Kota Jambi.

Jambi, Oktober 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199201 2 001

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
(Kepala Dinas PMPPA)

H. Hendy Sauki, S. Sos

(Sekretaris Dinas PMPPA)

Penanggung Jawab

Hj. Rosdalia, SH, MH

(Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak)

Penulis Naskah :

Deki Kurniawan, S. Pt

(JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Editor

M. Khoirul Rizal, S. Kom

(Pranata Komputer Ahli Pertama)

Kontributor Data

Irma Rosita, SE (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Zahara, S. Pdi (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Elvira Savitri (Arsiparis Terampil)

Sanggup Rehulina Sitanggang

Bram Kurniawan, SE

Andi Nugraha, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	6
C. Sumber Data	6
BAB II GAMBARAN UMUM.....	7
A. Kondisi Geografis.....	7
B. Visi dan Misi Kota Jambi	10
BAB III KEPENDUDUKAN.....	12
A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	12
B. Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin.....	14
C. Penduduk Produktif.....	15
BAB IV PENDIDIKAN	17
A. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	19
B. Angka Partisipasi Murni (APM)	20
C. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	21
D. Angka Melek Huruf.....	22
E. Angka Putus Sekolah.....	24
F. Angka Kelulusan	26
BAB V KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB).....	28
A. Jaminan Kesehatan Nasional	30
B. Angka Harapan Hidup.....	32
C. Penderita HIV/ AIDS.....	34

D. Keluarga Berencana (KB)	35
E. Usia Perkawinan Pertama.....	40
BAB VI KETENAGAKERJAAN	42
A. Penduduk Usia Kerja	44
B. Pencari Kerja Terdaftar	46
C. Tenaga Kerja Migran.....	47
D. Pengangguran	49
E. Pekerja Terkena PHK.....	51
F. Koperasi.....	53
BAB VII PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK	55
A. Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif.....	57
B. Perempuan di Pemerintahan	59
C. Organisasi Perempuan	62
D. Perempuan di Sektor Pertanian	65
BAB VIII PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK	68
A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	69
B. Perempuan Kepala Keluarga	74
BAB IX PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, kebutuhan pada upaya pembangunan (development) diberbagai sektor menjadi keperluan primer, hal tersebut tentu harus diikuti dengan perencanaan pembangunan yang penuh perimbangan dan hati-hati sebagai respon terhadap muatan-muatan lokal di dalamnya baik itu pada demografi sosialnya, sumber daya manusia, geografis, ekonominya, politik, kesehatan dll, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan sampai pada suatu kondisi masyarakat yang lebih baik.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil Pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan.

Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Paradigma pembangunan dalam sudut apapun perlu melihat keterkaitan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai faktor yang utama pembangunan.

Kompleksnya permasalahan sosial berkenaan pembangunan dapat bersumber dari ketidakadilan termasuk dalam ketimpangan gender, kemudian jika ditelusuri lebih dalam persoalan tersebut maka pihak perempuanlah yang kerap kali paling banyak dirugikan. Contohnya partisipasi perempuan dalam akses, banyak perempuan yang tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki baik tersebut dalam pengambilan keputusan atau kesempatan pada pendidikan, terlebih pada perempuan pedesaan yang rentan mengalami putus sekolah. Sebab yang mendasar adalah pandangan masyarakat pedesaan yang masih melihat perempuan tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi di wilayah domestik, pada praktiknya dipersempit perannya sebagai ibu dan mengurus keluarga, sehingga dianggap tidak perlu pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi dirinya diluar pekerjaan domestik.

Perempuan dan pembangunan dalam konteks ini pembangunan juga mencakup upaya mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat atau penduduk agar memperoleh kualitas hidup yang baik, yang bentuknya berupa jaminan sosial. Di Indonesia pelaksanaan jaminan sosial masih menemui beragam persoalan terlebih kepada penerima masyarakat miskin. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh aktivis terkait pelaksanaan sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial dirasa masih belum berspektif gender dan belum pro terhadap masyarakat miskin dan marginal.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki keberhidupan masyarakat baik tersebut laki-laki atau perempuan sebagai subyek dari pembangunan, termasuk poin didalamnya adalah untuk tercapainya keadilan yang berspektif gender. Selain menghadapi kompleksnya isu yang ada kajian Gender sampai saat ini, nyatanya masih memiliki daya tarik tersendiri untuk terus diurai sebagai respon dari fenomena sosial yang ada, maka perlu upaya-upaya untuk mencari penyelesaiannya melalui berbagai keilmuan terlebih dalam disiplin ilmu sosial. Berlangsungnya ketidakadilan gender seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata juga mempunyai implikasi terhadap persoalan kesehatan reproduksi (reproductive health) dan hak-hak reproduksi (reproductive right).

Untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan, Pemerintah Kota Jambi melalui kebijakan dan program yang diintegrasikan dengan kebutuhan, aspirasi dan permasalahan Perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan dan program yang selaras dengan program Pembangunan nasional. Strategi dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender disebut dengan pengarusutamaan gender atau yang lebih dikenal dengan PUG, dimana untuk rencana implementasinya diperlukan suatu analisis gender. Oleh karena itu diperlukan data dan fakta serta informasi tentang isu gender seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang dapat menggambarkan kesenjangan gender.

Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinansi, kekerasan dan beban ganda). Secara internasional Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada Convention on the Elimination of all form of discrimination against women, dimana berkewajiban untuk menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan. Sesuai dengan Inpres nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan

gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan Analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki serta mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Data terpilah sebagai salah satu prasyarat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang satu data gender dan anak.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “Profil Gender Kota Jambi Tahun 2024” sebagai gambaran keadaan perempuan di Kota Jambi secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Adapun beberapa tujuan, dalam penulisan dan pembuatan profil gender Kota Jambi tahun 2024 ini :

- a. Memberikan gambaran penyelenggaraan PUG di Kota Jambi.
- b. Menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya.
- c. Memberikan gambaran permasalahan dan rekomendasi dalam perspektif Gender.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender Kota Jambi tahu 2024 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu data-data yang dihimpun dari OPD lingkup Pemerintah Kota Jambi serta dari Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41' Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM² atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM².

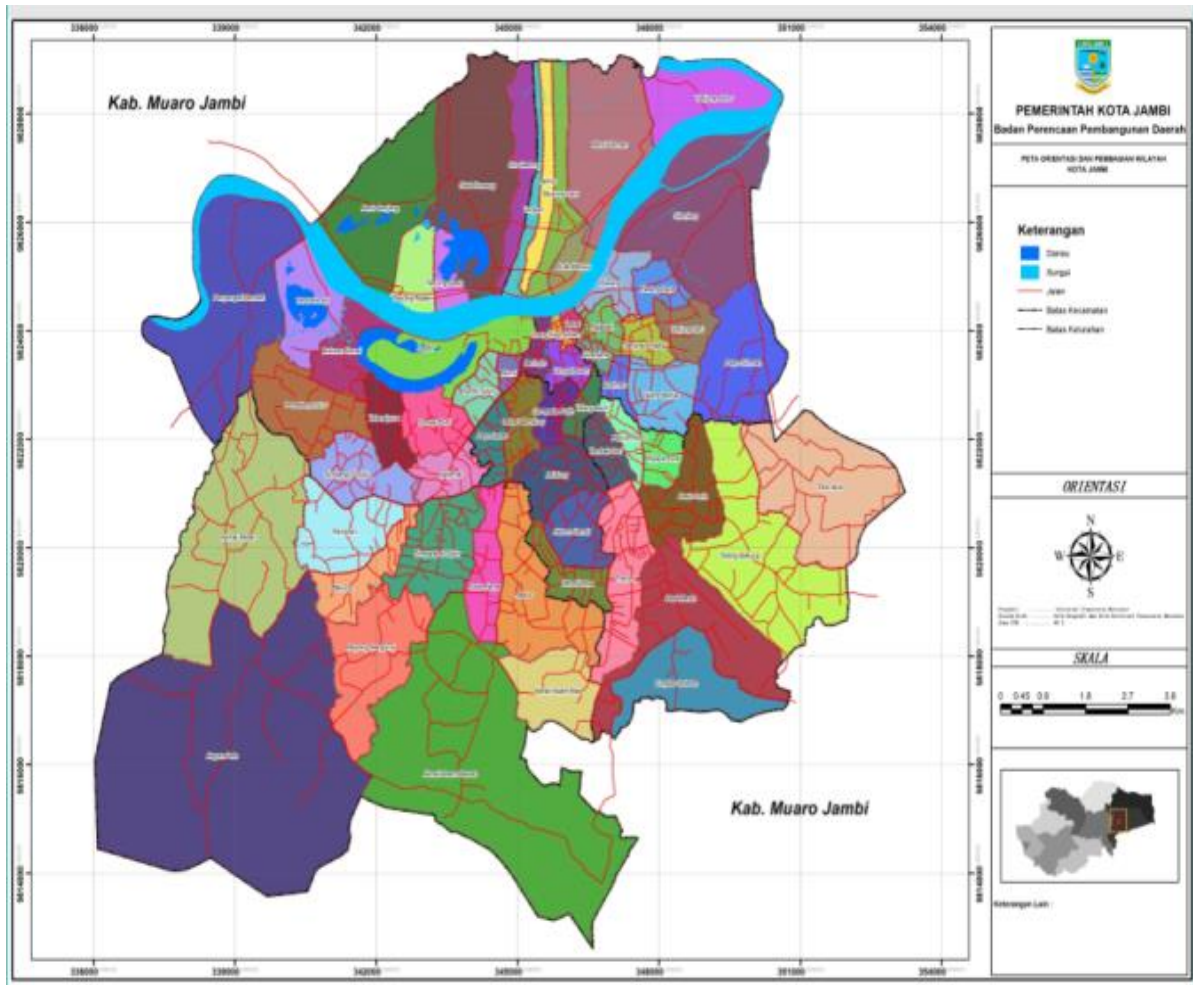
Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 68 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	7
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	7
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	7
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	6
Jumlah		175,53	100	68

Sumber: Rancangan awal RPJMD Kota Jambi 2018-2023



Sumber : RPJMD Kota Jambi tahun 2018 - 2023

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut

B. Visi dan Misi Kota Jambi

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

1. **Pusat Perdagangan dan Jasa** : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional.
2. **Berbasis Masyarakat** : community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan.
3. **Berakhlak** : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan.

4. **Berbudaya** : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.
5. **Pelayanan Prima** : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi.
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat.
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan.
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan.
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

BAB III

KEPENDUDUKAN

A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk adalah faktor utama dalam pembangunan, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat meningkatkan kualitas penduduk dan memanfaatkan potensi mereka secara optimal untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam pembangunan, penting untuk memperhatikan struktur umur penduduk, terutama terkait dengan beban ketergantungan. Beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Penduduk merupakan salah satu modal dasar dari pembangunan, karena yang berperan besar dalam proses pembangunan adalah penduduk itu sendiri. Tercatat penduduk Kota Jambi pada tahun 2023 sebanyak 637.510 jiwa terdiri dari laki-laki 320.196 jiwa dan perempuan 317.314 jiwa.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kota Jambi tahun 2023
menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Telanaipura	27,937	27,937	27,937
Jambi Selatan	29,116	29,116	29,116
Jambi Timur	33,545	33,545	33,545
Pasar Jambi	5,493	5,493	5,493
Pelayangan	6,932	6,932	6,932
Danau Teluk	6,808	6,808	6,808
Kota Baru	45,043	45,043	45,043
Jelutung	30,081	30,081	30,081
Alam Barajo	56,699	56,440	113,139
Danau Sipin	21,429	21,429	21,429
Paal Merah	57,113	57,113	57,113
Total	320,196	320,196	320,196

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2024

B. Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kota Jambi didominasi oleh penduduk muda. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 10 s/d 14 tahun.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kota Jambi tahun 2023 menurut
kelompok usia dan jenis kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
00-04	24,575	23,094	47,669
05-09	28,956	26,849	55,805
10-14	30,009	27,980	57,989
15-19	25,334	24,073	49,407
20-24	26,891	26,013	52,904
25-29	25,073	25,160	50,233
30-34	24,816	24,931	49,747
35-39	24,411	24,718	49,129
40-44	25,413	26,284	51,697
45-49	22,494	22,789	45,283

50-54	19,479	19,978	39,457
55-59	15,018	15,890	30,908
60-64	11,815	11,982	23,797
65-69	7,923	8,328	16,251
70-74	,391	4,679	9,070
75+	3,598	4,566	8,164
Total	320,196	317,314	637,510

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2024

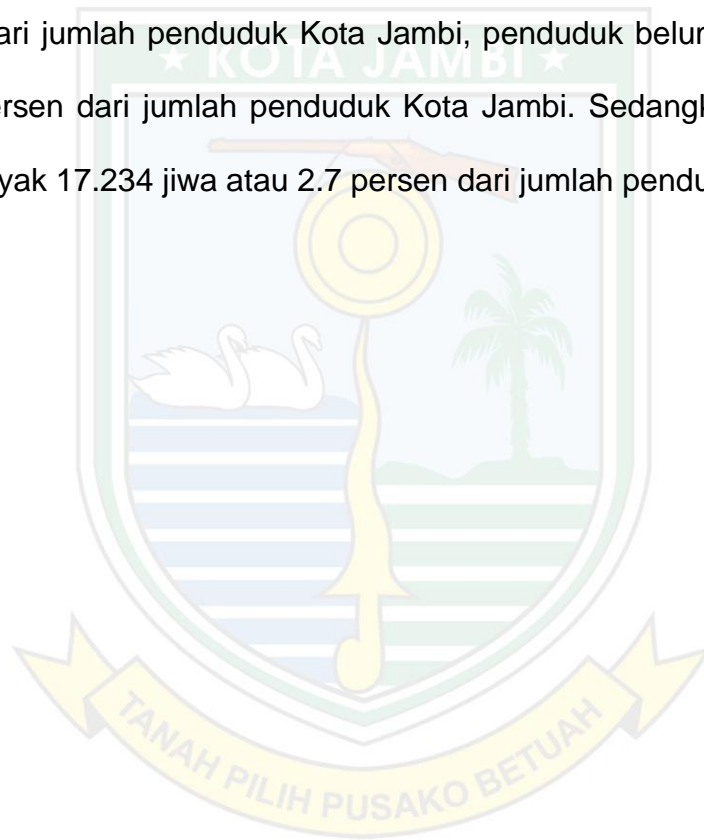
Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Jambi didominasi oleh anak-anak usia 05 – 14 tahun. Dengan tingginya persentase penduduk usia anak, maka kebijakan dan program- program pembangunan agar lebih difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

C. Penduduk Produktif

Pengelompokan penduduk Indonesia dapat dilakukan berdasarkan interval atau rentang umurnya. Misalnya saja, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usia produktif diukur dari rentang umur 15 hingga 64 tahun. Usia produktif merupakan modal besar untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, pendapatan, juga daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Jumlah usia produktif yang mencapai 70 % melebihi separuh penduduk menjadikan negara kita masih masuk ke dalam bonus demografi.

Tingginya penduduk usia produktif juga meningkatkan jumlah angkatan kerja yang menuntut banyaknya lapangan kerja, namun hal ini tidak sebanding dengan angka penduduk pencari kerja yang banyak. Sebagai kelompok usia produktif, kita juga bisa membuka lapangan usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan agar meningkatkan perekonomian penduduk.

Penduduk Produktif di Kota Jambi tahun 2023 sebanyak 442.562 jiwa atau 69.42 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi, penduduk belum produktif 161.463 jiwa atau 25 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi. Sedangkan penduduk tidak Produktif sebanyak 17.234 jiwa atau 2.7 persen dari jumlah penduduk Kota Jambi.



BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu. Sampai sekarang ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap karena sifatnya yang kompleks seperti sarannya yaitu manusia. Sifatnya yang kompleks itu sering disebut ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan. Ilmu pendidikan lebih berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan pemikiran ilmiah. Pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki keterkaitan dalam artian praktik serta teoritik. Sehingga, dalam proses kehidupan manusia keduanya saling berkolaborasi.

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan.

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak

sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ketinggian kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (peserta didik) lebih kritis dalam berpikir.

Dalam pendidikan terdapat dua hal penting yaitu aspek kognitif (berpikir) dan aspek afektif (merasa). Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya tidak saja proses berpikir yang ambil bagian tapi juga ada unsur-unsur yang berkaitan dengan perasaan seperti semangat, suka dan lain-lain. Substansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membebaskan manusia dan menurut Drikarya adalah memanusiakan manusia. Ini menunjukkan bahwa para pakar pun menilai bahwa pendidikan tidak hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif saja tapi cakupannya harus lebih luas.

Terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang relevan dan bermutu merupakan faktor penentu keberhasilan kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Larena itu, para pendiri Republik menetapkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh warga negara, baik laki- laki maupun perempuan, baik normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Pembangunan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tanpa membedakan antara laki- laki dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga,

peran perempuan dalam menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan penting sebagai ibu. Ibu yang berkualitas diharapkan akan membentuk anak-anak yang lebih berkualitas.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah juga dapat mewujudkan salah satu program SDGs tentang kesetaraan dalam memperoleh kesempatan belajar. Program ini akan menjamin setiap anak-anak akan mendapatkan manfaat dari lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah mulai jenjang pendidikan pra sekolah (5-6 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi akan menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan.

Tabel 4.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kota Jambi
Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Kelamin	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 23
Laki-laki	100	92.80	82.63	47.51
Perempuan	99.21	97.41	92.72	48.95

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2023

Di Kota Jambi APS pada jenjang pendidikan SD (usia 7–12 tahun) menunjukkan angka 99,36 persen untuk laki-laki dan 100 pesen untuk jenis kelamin perempuan. Angka ini memperlihatkan bahwa penduduk perempuan telah mendapatkan akses yang sama untuk mengenyam pendidikan.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 4.2

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Jambi

Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	PT
Laki-laki	100	75.28	69.97	38.52
Perempuan	99.21	75.22	71.05	46.71

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) Kelompok perempuan dan laki-laki pada jenjang SD/ MI hampir mencapai angka 100 %. Pada tingkatan pendidikan SMA menunjukkan bahwa APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pemba-ngunan kualitas sumber daya manusia adalah tingkat partisipasi penduduk pa-da berbagai jenjang Pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisi-pasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, diharapkan kualitas sum-ber daya manusia dapat menjadi lebih baik. Indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah Angka Par-tisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	PT
Kota Jambi	107.19	81.08	110.33	60.86

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2023

D. Angka Melek Huruf

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, Lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Tabel 4.4

Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk

Kota Jambi Usia 15 Tahun Tahun 2023

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	99.83	39.03
Perempuan	99.07	37.75
Kota Jambi	99.45	38.37

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa AMH Kota Jambi sangat tinggi hampir mencapai 100 persen. Angka persentase ini cukup signifikan dan lebih tinggi dibanding rata-rata pencapaian AMH Nasional. Persentase penduduk yang melek huruf laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, walaupun perbedaannya tidak begitu signifikan.

Semakin tinggi Angka Melek Huruf perempuan, berarti akan semakin meningkat dan terbukanya peluang bagi perempuan untuk memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah perempuan yang berkualitas. Berbagai program telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan penduduk.

E. Angka Putus Sekolah

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun suatu negara. Pemberian pendidikan formal, non formal maupun informal dari usia dini bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pada masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan untuk kemajuan negara. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia secara keseluruhan.

Setiap manusia berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan, baik secara formal, informal maupun non formal, sehingga pada gilirannya ia akan memiliki mental, akhlak, moral dan fisik yang kuat serta menjadi manusia yang berbudaya tinggi dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Suatu pembangunan nasional tidak hanya tergantung pada sumber-sumber dan kekayaan alam yang terkandung oleh bangsa yang bersangkutan, antara daratan dan lautan suatu negara dengan pendapatan perkapita yang dimiliki rakyatnya, terdapat suatu variabel penting yang menghubungkan keduanya, variabel tersebut adalah pendidikan.

Tidak heran banyak negara di dunia mengalokasikan dana yang besar untuk Pendidikan. Hal tersebut menunjukkan betapa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan bidang pendidikan. Hal ini tidak lepas karena pembangunan pendidikan memainkan peran kunci dalam strategi penanggulangan kemiskinan melalui perluasan akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar dan program lanjutannya untuk menghasilkan lulusan yang dapat menjadi pekerja mandiri dan produktif dengan upah yang baik.

Namun banyaknya kasus putus sekolah dapat mengakibatkan rendahnya pendidikan suatu bangsa dan akan berpengaruh terhadap peringkat indeks pembangunan manusia (IPM), padahal peringkat IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Masalah putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar, tidak bekerja atau berpenghasilan tetap, dapat menjadi beban masyarakat bahkan dapat menjadi pengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan atau pengalaman intelektual yang seharusnya bisa didapatkan di sekolah, serta tidak memiliki ketrampilan yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Lebih-lebih bila mengalami frustrasi dan merasa rendah diri tetapi bersikap overkompensasi, bisa menimbulkan gangguan-gangguan dalam masyarakat berupa perbuatan kenakalan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Masalah putus sekolah bisa menimbulkan ekses dalam masyarakat, karena itu penanganannya menjadi tugas kita semua.

Tabel 4.5

Angka Putus Sekolah di Kota Tahun 2023

Jenis Kelamin	SD	SMP	JUMLAH
Laki-laki	1	2	3
Perempuan	3	1	4

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2024

F. Angka Kelulusan

Penilaian pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Guru, ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian mempunyai maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan. Apabila sekolah diumpamakan sebagai tempat mengolah sesuatu dan calon siswa diumpamakan sebagai bahan mentah, maka lulusan dari sekolah itu dapat disamakan dengan hasil olahan yang sudah siap digunakan.

Kelulusan adalah suatu apresiasi yang di dapat seorang siswa atas hasil belajarnya selama bersekolah. Kelulusan biasanya di peroleh saat seseorang telah menyelesaikan studinya. Hasil Kelulusan dijadikan sebagai bukti untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuan dari kelulusan itu sendiri adalah memajukan kualitas sekolah. Hal ini biasa di lakukan dengan cara meningkatkan kualitas nilai kelulusan siswa. Hal ini akan membantu pihak sekolah membangun model klasifikasi dan menentukan model klasifikasi mana yang terbaik.

Tabel 4.6

Angka Putus Sekolah di Kota Tahun 2023

Jenis Kelamin	SD	SMP	JUMLAH
Laki-laki	5.180	4.302	10.047
Perempuan	4.867	4.176	8.478

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi 2024



BAB V

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 memberikan batasan: kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) yang paling baru yaitu bahwa Kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada dasarnya kesehatan mencakup tiga aspek yaitu fisik, mental, dan sosial, tetapi menurut undang-undang No. 23/1992, kesehatan mencakup empat aspek yaitu fisik, mental, sosial, dan Ekonomi.

Kesehatan terdiri dari kesehatan individu, kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat. Khusus kesehatan keluarga, WHO menyatakan bahwa kesehatan keluarga mengandung arti sebagai lembaga sosial primer dalam promosi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam kesehatan keluarga, keluarga merupakan kunci utama bagi kesehatan serta perilaku sehat sakit, oleh karena itu keluarga terlibat langsung dalam mengambil keputusan dan terapeutik pada setiap tahap sehat-sakit anggota keluarga.

Dalam keluarga terdapat fungsi keluarga, fungsi tersebut terdiri dari lima fungsi dan satu diantaranya terkait dengan kesehatan. Fungsi keluarga yang terkait dengan kesehatan adalah fungsi perawatan keluarga, dimana keluarga memberikan perawatan kesehatan yang bersifat preventif dan secara bersama-sama merawat anggota keluarga yang sakit. Kesanggupan keluarga melaksanakan perawatan atau pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan.

Kesehatan merupakan indikator yang lebih mencerminkan pembangunan yang langsung menyentuh atau dirasakan manfaatnya oleh manusia atau rakyat disuatu negara yang sebelumnya hanya terbatas pada konsep penghasilan. Kesehatan juga merupakan hak azasi manusia, karena kesehatan merupakan kodrat manusia yang sesuai dengan deklarasi hak azasi manusia dan konstitusi.

Investasi kesehatan sangat berguna dalam meningkatkan nilai manusia yang berupa peningkatan ketahanan fisik dan intelegensia, serta dapat mengurangi penyusutan nilai manusia. Perbaikan kesehatan dan gizi yang terus menerus menuju pada suatu keadaan yang sehat dan bergizi seimbang akan dapat mempertahankan kondisi bobot fisik tubuh manusia.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi

selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

A. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan (UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN). Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care).

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di era JKN meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). FKTP berupa Puskesmas atau yang setara, seperti dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan rumah

sakit kelas D pratama atau yang setara, yang harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif.

Fasilitas Kesehatan (faskes) yang dicakup sebelum era JKN seperti Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menggunakan Puskesmas dan jaringannya, Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja (Jamsostek) menggunakan praktek dokter swasta, Asuransi Kesehatan (Askes) bagi PNS menggunakan Puskesmas dan dokter praktek swasta, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarga dan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hanya menggunakan Pemberi Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah.

Tabel 5.1

Penduduk Kota Jambi yang mempunyai keluhan Kesehatan dalam sebulan terakhir dan rawat Jalan Yang menggunakan Jaminan Kesehatan Tahun 2023

Jenis Kelamin	Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan
Laki-laki	69.49
Perempuan	73.55
Kota Jambi	71.68

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, Tahun 2023

B. Angka Harapan Hidup

Kemajuan suatu negara dapat tercermin dengan merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggambarkan tingkat perkembangan manusia dalam suatu negara. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan, yang secara signifikan mencerminkan Indeks Pembangunan Manusia yang positif. Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang dipengaruhi oleh indikator kesehatan, diwakili oleh umur (harapan hidup), indikator pendidikan, diwakili oleh tingkat melek huruf, dan indikator ekonomi, diwakili oleh pengeluaran riil perkapita. Indikator dari indeks pembangunan manusia mencakup angka harapan hidup pada waktu lahir, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Angka harapan hidup mengukur aspek kesehatan, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur aspek pendidikan, sedangkan kemampuan daya beli mengukur standar hidup.

Dengan meningkatnya angka harapan hidup, peningkatan harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah, nilai IPM suatu negara cenderung meningkat. Ini menandakan bahwa negara tersebut berhasil mencapai perkembangan positif dalam aspek Kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang erat karena keduanya mencerminkan aspek-aspek penting dalam pembangunan manusia. AHH menjadi indikator utama dalam mengukur Tingkat kesehatan suatu populasi, sedangkan IPM adalah indeks komposit yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

AHH digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi rata-rata usia hidup suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks IPM, AHH menjadi salah satu faktor penting dalam dimensi kesehatan. Tingkat AHH yang tinggi mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik. Ketika AHH meningkat, hal ini dapat berkontribusi positif terhadap nilai IPM suatu negara. Bayi yang memiliki AHH tinggi memiliki peluang hidup yang lebih panjang, yang dapat memberikan dampak positif terhadap rata-rata harapan hidup penduduk secara keseluruhan. Peningkatan AHH juga mencerminkan keberhasilan program-program kesehatan dan pelayanan medis dalam suatu negara, yang secara langsung mempengaruhi dimensi kesehatan dari IPM.

Dengan demikian, pemahaman dan pemantauan terhadap hubungan antara AHH dan IPM menjadi kunci dalam merancang kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesehatan sebagai fondasi utama dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal.

Tabel 5.2
 Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk
 Kota Jambi Tahun 2023

No	Daerah	Umur Harapan Hidup (UHH)		
		2021	2022	2023
1.	Kota Jambi	72,71	72,99	74,85
2.	Provinsi Jambi	71,22	71,50	73,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2024

C. Penderita HIV/ AIDS

HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired berarti didapat, bukan keturunan. Immuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency berarti kekurangan. Syndrome atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir.

AIDS muncul setelah virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama lima hingga sepuluh tahun atau lebih. HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya.

Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja lama kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pada tahapan itulah penderita disebut sudah terkena AIDS.

Tabel 5.3

Jumlah Penderita HIV/ AIDS di Kota Jambi Tahun 2023

No	Daerah	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kota Jambi	158	29	187

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

D. Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan mengatur waktu, jarak, jumlah kehamilan, sehingga dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan ibu hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin. Keluarga berencana adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan anak.

Menurut World Health Organization, Keluarga Berencana (Family Planning) dapat memungkinkan pasangan usia subur (PUS) untuk mengantisipasi kelahiran, mengatur jumlah anak yang diinginkan, dan mengatur jarak serta waktu kelahiran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan Tindakan infertilitas. Jadi, Keluarga Berencana (Family Planning) adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan

menggunakan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia sejahtera.

Tujuan dilaksanakan program KB yaitu membentuk keluarga kecil sesuai dengan sosial ekonomi keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan program KB lainnya yaitu menjarangkan, menunda dan menghentikan kehamilan untuk menurunkan angka kelahiran, menyelamatkan ibu dan bayi akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua.

Dasar hukum kebijakan KB mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur untuk membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pemerintah bertanggung jawab menjamin penyediaan pelayanan KB yang aman dan bermutu sesuai standar profesi dan etik, yang berkelanjutan, dan dapat menjangkau serta terjangkau masyarakat. Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan pelayanan KB dijelaskan melalui Permenkes Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Dan terkait pembiayaan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Lebih lanjut Dasar Hukum kebijakan KB, mengacu juga kepada Undang-Undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 20 menyebutkan pemerintah menetapkan kebijakan KB melalui penyelenggaraan program KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Program KB dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga melalui dua tujuan antara lain:

1. Menurunkan kelahiran menuju keseimbangan antara penduduk, pembangunan, dan lingkungan.
2. Menurunkan kehamilan risiko tinggi kesakitan dengan cara mencegah kehamilan tidak diinginkan dan menghindari kehamilan '4 terlalu' (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak) serta kehamilan dengan masalah Kesehatan.

Tidak ada kehamilan berarti tidak ada kematian maternal, dan penurunan kehamilan risiko tinggi berarti penurunan risiko kematian maternal. Supaya penduduk hidup sehat dan sejahtera, maka jumlah dan pertumbuhan penduduk perlu berimbang dengan pertumbuhan pembangunan termasuk sosial-ekonomi, kesehatan, dan daya tampung serta daya dukung lingkungan.

Program KB tidak melarang tetapi mengatur supaya kehamilan terjadi hanya apabila ibu telah siap fisik, mental, dan sosial. Apabila ibu belum siap hamil, ingin membatasi atau menunda kehamilan, program KB menganjurkan ibu memakai alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan kesehatan ibu. Sebagai prinsip, kehamilan sebaiknya terjadi pada situasi ibu dalam risiko terendah gangguan kesehatan.

Tabel 5.4
Jumlah Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kota Jambi
Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jenis Alat Kontrasepsi						
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perempuan	3.959	2.364	-	-	3.199	32.408	10.428
2.	Laki-laki	-	-	66	3.843	-	-	-

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi, 2024

Tabel 5.5
Jumlah penyuluh KB di Kota Jambi menurut Kecamatan
Dan jenis kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Telanaipura	2	4	6
2.	Jambi Selatan	2	2	4
3.	Jambi Timur	3	4	7
4.	Pasar Jambi	2	3	5
5.	Pelayangan	3	3	6
6.	Danau Teluk	3	2	5
7.	Kota Baru	2	5	7

8.	Jelutung	2	5	7
9.	Alam Barajo	1	4	5
10.	Danau Sipin	1	4	5
11.	Paal Merah	1	4	5
Jumlah		22	40	62

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi, 2024

Tabel 5.6
Jumlah kader KB di Kota Jambi menurut Kecamatan
Dan jenis kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Telanaipura	-	65	65
2.	Jambi Selatan	-	74	74
3.	Jambi Timur	-	96	96
4.	Pasar Jambi	-	34	34
5.	Pelayangan	-	33	33
6.	Danau Teluk	-	32	32
7.	Kota Baru	-	76	76
8.	Jelutung	-	107	107
9.	Alam Barajo	-	94	94
10.	Danau Sipin	-	66	66
11.	Paal Merah	-	68	68
Jumlah				745

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi, 2024

E. Usia Perkawinan Pertama

Pertambahan jumlah penduduk tidak dapat terlepas dari faktor demografi diantaranya fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk). Suatu ciri negara sedang berkembang adalah hampir semua negara memperlihatkan tingkat fertilitas (kelahiran) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara maju.

Salah satu indikator sosial demografi yang penting dalam mempengaruhi fertilitas adalah usia perkawinan pertama, karena usia perkawinan pertama wanita berkaitan dengan permulaan wanita melakukan hubungan suami istri yang memungkinkan wanita berisiko untuk hamil, oleh karena itu pada Masyarakat yang wanitanya melakukan perkawinan pertama pada umur muda, angka kelahirannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang wanitanya melakukan perkawinan pertama kali pada usia lebih tua.

Usia perkawinan pertama wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi, budaya dan faktor tempat tinggal desa atau kota. faktor pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap usia perkawinan pertama, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai. Pernikahan seringkali menyebabkan tidak lagi bersekolah, karena kini seorang wanita mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian

dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Kondisi ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap usia perkawinan pertama pada wanita. Hal ini dilatarbelakangi alasan kemiskinan karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga orang tua ingin anaknya segera menikah, ingin lepas tanggung jawab, dan orang tua berharap setelah anaknya menikah akan mendapat bantuan secara ekonomi. Disamping itu faktor budaya yang dianut oleh masyarakat setempat juga turut mempengaruhi dalam pengambilan Keputusan untuk menentukan perkawinan anaknya. Secara budaya perkawinan dipengaruhi oleh lingkungan setempat yang berpendapat bahwa malu menjadi perawan tua, lebih baik menjadi janda muda daripada perawan tua, jadi konotasi perawan tua merupakan momok bagi sebagian masyarakat. Faktor sosial yang berpengaruh terhadap usia perkawinan pertama pada wanita adalah faktor pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua dan rendahnya pendidikan anak mendorong pernikahan usia muda.

Tabel 5.7

Persentase Perempuan Kota Jambi pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama tahun 2023

No.	Usia Perkawinan Pertama	Persentase
1.	< 19 Tahun	16.05
2.	> 19 Tahun	83.95

Sumber : Statistik Kesejahteraan Penduduk Provinsi Jambi, 2023

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Badan Pusat Statistik pada tahun sekitar 1970-an menentukan batas usia kerja bila seseorang berumur 10 tahun atau lebih. Semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja) batas usia kerja dirubah menjadi 15 tahun atau lebih, ini dilaksanakan karena dianjurkan oleh International Labour Organization (ILO).

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (demand) dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat employment) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Pada ekonomi ekonomi klasik bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan meningkat ketika upah naik, sebaliknya permintaan tenaga kerja akan berkurang ketika upah turun.

Kesempatan kerja berhubungan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, maka definisi dari kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah di

isi dan semua lapangan pekerjaan yang masih terbuka. Lapangan pekerjaan yang terbuka menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi perusahaan tersebut pada Tingkat upah, posisi (jabatan), dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan sulit diperoleh, maka yang digunakan adalah besarnya jumlah orang yang bekerja pada daerah tertentu.

Tingginya kesempatan kerja di suatu daerah akan berpengaruh pada pembangunan ekonominya, dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi.

Adanya persamaan kesempatan kerja saat ini, meningkatkan minat tenaga kerja wanita untuk berpartisipasi aktif dalam lapangan kerja. Lapangan kerja yang banyak diminati oleh tenaga kerja wanita adalah sektor informal seperti perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan lain sebagainya. Tenaga kerja wanita telah memperoleh perhatian secara khusus dalam dunia ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena kompleksnya problematika yang dihadapi oleh tenaga kerja wanita itu sendiri, baik dalam kaitannya dengan pengembangan potensi pribadinya maupun dalam kaitannya dengan perikehidupan berkeluarga dan sekaligus bermasyarakat.

Sektor informal memiliki persentase pekerja informal wanita lebih besar disbanding dengan sektor yang lain. Penyebabnya adalah pada sektor informal memiliki waktu yang fleksibel dan tidak mempunyai banyak syarat untuk memasukinya. Sektor jasa lebih fleksibel bagi wanita, artinya selain untuk menambah pendapatan keluarga, fungsi sebagai ibu rumah tangga juga masih dapat dilakukan. Dengan adanya fleksibilitas pada sektor informal tersebut memungkinkan tenaga kerja wanita lebih sesuai bekerja didalamnya. Di sektor informal pada lapangan kerja perdagangan tersebut wanita tanpa berpendidikan tinggipun dapat dengan mudah melaksanakannya.

Faktor lain yang membuat semakin besarnya kesempatan tenaga kerja wanita untuk bekerja pada sektor informal adalah mobilitas yang semakin baik, yang didukung oleh faktor penarik seperti adanya informasi mengenai peluang kerja yang lebih baik ditempat tujuan, sarana dan prasarana yang lebih baik, transportasi, tempat hiburan yang lebih banyak. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja wanita yang terdorong untuk melakukan migrasi masuk.

A. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk usia kerja dapat pula kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah semua orang yang siap bekerja disuatu Negara. Kelompok tersebut biasanya disebut

sebagai kelompok usia produktif. Dari seluruh angkata kerja dalam suatu Negara tidak semuanya mendapat kesempatan bekerja. Diantaranya ada pula yang tidak bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja.

Tabel 6.1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jambi tahun 2023

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja	187.535	123.513	311.048
	a. Bekerja	174.480	110.837	285.317
	b. Pengangguran terbuka	13.055	12.676	25.731
2.	Bukan Angkatan Kerja	52.647	115.973	168.620
	a. Sekolah	23.126	22.048	45.174
	b. Mengurus rumah tangga	13.680	85.820	99.500
	c. Lainnya	15.841	8.105	23.946
Total		240.182	239.486	479.668

Sumber : Kota Jambi dalam Angka tahun 2024

B. Pencari Kerja Terdaftar

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Hal penting terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada dapat dikelola dan dikembangkan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. SDM dalam pembangunan nasional mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. SDM sebagai salah satu aktor penting dan jumlah penduduk di dalam suatu negara merupakan unsur utama dalam pembangunan. Paradigma pembangunan yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara berkembang di dunia memiliki masalah yang krusial, dimana jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja akan menyebabkan terjadinya masalah pengangguran yang dapat membebani anggaran negara.

Program-program pemerintah berusaha untuk memudahkan pencari kerja dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui badan tenaga kerja pemerintah, yang memberikan informasi lowongan kerja. Cara lain adalah melalui program-program pelatihan publik, yang bertujuan mempermudah penyaluran tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang mengalami pertumbuhan. Dengan adanya program akan membuat perekonomian berjalan lebih efisien dan menjaga angkatan kerja terus bekerja.

Tabel 6.2

Jumlah Pencari Kerja terdaftar di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2023

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pencari kerja terdaftar	777	637	1.414

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2024

C. Tenaga Kerja Migran

Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana izin tersebut tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, dan Perizinan Berusaha harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun
- b. Memiliki kompetensi
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Tabel 6.3

Jumlah Tenaga kerja Migran terdaftar di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2023

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tenaga Kerja Migran	58	8	66

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2024

D. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena kondisi ekonomi, Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, Pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, memiliki pendidikan yang

tinggi tapi tidak memiliki peluang kerja dikarenakan tidak memiliki akses sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun selalu meningkat tidak pernah mengalami penurunan, budaya suatu daerah dimana yang berkerja itu hanya perempuan saja sementara kaum adam tidak berkerja, Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia sangat cukup tinggi dari tahun ke tahun, lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan" dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar dan banyak efek negatif dari hal ini salah satunya tingkat kriminalitas tiap daerah juga ikut bertambah karena dorongan ekonomi.

Tabel 6.4

Jumlah Pengangguran terdata di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2023

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pengangguran	13.055	12.676	25.731

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2024

E. Pekerja Terkena PHK

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu kondisi dimana karyawan tidak berkerja lagi atau diberhentikan oleh instansi. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa rugi bila hubungan kerja diteruskan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena keinginan sendiri, keinginan instansi selain itu terdapat bentuk lain yang menjadi faktor pemutusan hubungan kerja. Faktor pemutusan hubungan kerja dari instansi disebabkan:

- a. Karyawan Tidak Mampu Menyelesaikan Pekerjaannya
- b. Disiplin Yang Kurang Baik Dan Perilaku
- c. Melanggar Peraturan Dari Instansi
- d. Tidak Dapat Berkerja Sama, Sehingga Terjadi Konflik Dengan Karyawan Lain
- e. Melakukan Tindakan Amoral Dari Instansi
- f. Usia Lanjut
- g. Sakit Yang Berkepanjangan

Faktor dari diri sendiri yaitu :

- a. Permintaan Pengunduran Diri Adanya Pengajuan Yang Diberikan Langsung Oleh Karyawan Secara Pribadi, Dengan Alasan Untuk Mencari Instansi Yang Lebih Baik Dan Lebih Menguntungkan.
- b. Alasan Memasuki Usia Pensiun, Karyawan Akan Berhenti Bekerja Sesuai Dngan Kebijakan Usia Yang Telah Ditetapkan Instansi.
- c. Diberhentikan Karena Lalai, Adanya Karyawan Yang Berbuat Kecurangan Seperti Penipuan Dan Pencurian.
- d. Kesehatan Yang Kurang Baik.

e. Untuk Melanjutkan Pendidikan.

f. Ingin Berwiraswasta.

Dampak pemutusan hubungan kerja berdampak pada instansi maupun diri sendiri. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi instansi yaitu kekurangan sumber daya manusia, merugikan perusahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi, harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Solusi yang dilakukan instansi yaitu melakukan pembinaan pada karyawan dengan jangka waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan karyawan dan diberikan berupa peringatan, serta penjelasan akan tindakan yang telah dilakukan.

Dampak pemutusan hubungan kerja bagi diri sendiri berdampak pada perekonomian karyawan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Solusi yang dilakukan oleh diri sendiri yaitu mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, karyawan juga bisa memulai dengan berwirausaha dan membuat peluang pekerjaan baru.

Tabel 6.5

Jumlah Pekerja Terkena PHK terdata di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2023

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pekerja Terkena PHK	19	52	71

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2024

F. Koperasi

Pengertian Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asaskekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : “Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan,”.

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut : “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satusatunya bentuk perusahaan yang secara konstutisional dinayatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orag seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Tabel 6.6

Jumlah Koperasi terdata di Kota Jambi menurut jenis kelamin tahun 2023

No	Indikator	Status		Jumlah
		Aktif	Tidak Aktif	
1.	Koperasi	220	237	457

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2024

BAB VII

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Keterlibatan perempuan berperan pada sector produktif sepertinya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran yang sering pula disebut dengan peran disektor publik. Sektor publik lebih identik dengan karakter maskulin yang tegas, berani, cekatan dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga dikatakan bahwa sektor publik merupakan domain laki-laki. Kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dalam penyelesaian masalah, sedangkan karakteristik unggul dari feminitas berupa kesabaran, kejujuran dan kesetiaan dianggap tidak perlu dan tidak memiliki karakteristik unggul.

Meskipun jumlah komposisi perempuan yang bekerja di sektor publik masih rendah dibandingkan jumlah laki-laki yang bekerja di sektor publik, tetapi jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini disebabkan selain kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, juga karena adanya permintaan penerimaan tenaga kerja perempuan dan semaktingginya tingkat pendidikan perempuan. Faktor ini yang membuat peningkatan pada perempuan untuk bekerja.

Komposisi perempuan yang bekerja di sektor publik dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15

tahun ke atas. TPAK dapat menjadi indikator sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberikan ruang bagi partisipasi kesetaraan gender dan peluang kerja bagi perempuan khususnya pendidikan dan pekerjaan di sektor formal.

Perempuan bekerja di sektor publik umumnya sudah memperoleh pendidikan yang cenderung tinggi. Perempuan ingin merealisasikan pendidikan yang diterimanya dalam hal bekerja. Dalam masa pendidikan perempuan memperoleh ilmu dari pendidikan yang dijalannya. Perempuan mengaplikasikan ilmu tersebut dengan bekerja. Bekerja merupakan sebuah pencapaian untuk dapat meningkatkan taraf hidup manusia.

Perempuan yang bekerja disektor public dan berkeluarga bisa mengalami konflik peran, yang dinamakan intra-role-conflict atau konflik antar peran. Adapun sebabnya karena perempuan tersebut memegang dua posisi peran sekaligus, sementara tuntutan keduanya bisa tidak selaras bahkan kadang-kadang bertentangan. Disini muncul kebingungan pada perempuan, pertanyaan-pertanyaan seperti „siapa saya“ dan „bagaimana saya seharusnya?“, menimbulkan kesulitan terutama menurut teori peran mengakibatkan ketegangan pikiran dan ketidakstabilan emosi.

Masalah gender yang timbul pada sector formal adalah bahwa kebanyakan jabatan perempuan berada dilapisan bawah atau lebih rendah disbanding jabatan laki-laki. Hal ini terkait dengan stereotype yang terjadi di tempat kerja yang menganggap bahwa perempuan lebih memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga tidak cocok bila dipekerjakan sebagai pimpinan. Masalah rendahnya jabatan tadi berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan. Akar dari tingkat

pendapatan sebenarnya adalah tingkat Pendidikan. Pada sisi lain terdapat kenyataan bahwa pendidikan tinggi merupakan suatu hal yang langka bagi kebanyakan perempuan dinegara-negara berkembang.

Di sektor publik tepatnya pemerintah daerah, masih kurangnya keterwakilan perempuan pada posisi strategis ditentukan oleh cara pandang pemimpin daerah tersebut, disamping dikarenakan perempuan yang tidak mempromosikan dirinya sendiri. Alasan lain juga dikarenakan masih sedikitnya perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan ahli di bidang-bidangnya.

A. Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif

Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara tak terkecuali perempuan dalam sebuah Lembaga legislatif. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam penentuan arah kebijakan ini berangkat dari sejarah perempuan yang tertinggal dan dikategorikan sebagai masyarakat kelas kedua, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.

Hal tersebut bahkan memicu munculnya sejumlah regulasi untuk mendorong perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. Diantaranya adalah kebijakan afirmatif yang mengharuskan keterlibatan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislative dan kepengurusan partai politik.

Aturan di atas tertuang dalam sejumlah Undang-undang, diantaranya adalah Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik dimana merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik dan pencalonan.

Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Kendati demikian hingga hari ini praktik di lapangan aturan kuota 30 persen, masih dipandang sebatas pemenuhan syarat administratif pemilu, belum sampai pada mendudukkan Perempuan di parlemen dengan jumlah minimal 30 persen.

Tabel 7.1

Anggota legislatif Perempuan pada DPRD Kota Jambi Tahun 2024

No	Partai Politik	Nama	Jabatan
1.	Golkar	Dyah Kumala Dewi ZM, SH	Anggota
2.	Nasdem	Riza Delviarista	Anggota
3.	PAN	Menno Eka Desthya, Sst., MKM	Anggota
4.	PDI- Perjuangan	Maria Magdalena, SS	Anggota
5.	PKB	Syofni Herawati, SP	Anggota
6.	Demokrat	RR. Nelly Kurniasih Kawuri, SE	Anggota
7.	Demokrat	Hj. Hedriani, S. Pd	Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Jambi, 2024

B. Perempuan di Pemerintahan

Saat ini jika kita mengulas mengenai kepemimpinan, maka tidak hanya pemimpin laki-laki saja yang bekiprah di dunia bisnis, pemerintahan dan pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Sudah semakin banyak bermunculan pemimpin perempuan dalam dunia yang sama. Akan tetapi di era modern ini masih ada pandangan masyarakat tentang perempuan hanya sebatas bawahan laki-laki. Bahkan tidak jarang banyak yang menganggap perempuan tidak memiliki keterampilan dan sifat yang diperlukan dalam suatu organisasi, seperti bijaksana, bertanggungjawab dan lain-lain. Perempuan di Indonesia sering mengalami ketidakadilan gender melalui marginalisasi, subordinasi dan menjadi korban kekerasan karena berhubungan dengan tarik menarik antara domestik dan peran politik sehingga mengakibatkan kemiskinan dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum perempuan.

Perempuan saat ini telah bergerak pada proses pencapaian kesetaraan gender yang semakin baik. Salah satu faktor yang memberikan kontribusi pada pencapaian tersebut adalah upaya membina kesadaran kesetaraan gender dalam pemahaman keagamaan masyarakat. Pencapaian tersebut bukan tanpa tantangan dan persoalan, khususnya peran perempuan sebagai pemimpin baik dalam ranah pendidikan, sosial hingga politik. Sebagian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak baik karena penilaian perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya daripada akal.

Kepemimpinan perempuan adalah bagian dari prinsip-prinsip kesetaraan gender. Wacana tentang kepemimpinan perempuan kian mencuat seiring dengan derasnya arus informasi yang membuka paradigma berpikir masyarakat kekinian. Ditambah lagi dengan munculnya kaum perempuan pendobrak tradisi yang membatasi kiprah perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masyarakat telah banyak melihat kesuksesan kaum perempuan memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun non-formal. Kaum perempuan perlu diperhatikan dan dilibatkan dinamika perubahan lingkungan, karena menurut kaum perempuan sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan yang tidak kalah dengan kaum lelaki.

Kepemimpinan perempuan dalam lingkungan Pemerintah merupakan aspek yang semakin mendapatkan perhatian di era modern ini. Di dalam Pemerintah Kota Jambi, peran perempuan dalam kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan-tantangan tertentu yang perlu diidentifikasi dan diatasi guna meningkatkan efektivitas kepemimpinan perempuan di dalam organisasi ini.

Tabel 7.2

Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi menurut tahun dan jenis kelamin

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	2020	1.793	4.012	5.805
2.	2021	1.731	3.893	5.624
3.	2022	1.590	3.643	5.233
4.	2023	1.552	3.415	4.967

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi, 2024

Berdasarkan Tabel 7.2 ASN di Pemerintah Kota Jambi setiap tahun nya di dominasi oleh ASN Perempuan. Persentase ASN perempuan di Pemerintah Kota Jambi dari jumlah ASN sebesar 69.75 persen pada tahun 2023. Penurunan jumlah ASN Perempuan tahun 2023 disebabkan oleh banyaknya yang memasuki masa pensiun.

Tabel 7.3
Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi yang Menduduki
Eselon II, III, IV dan Camat, jabatan fungsional dan PPPK tahun 2023

No	Jabatan	Tahun 2023	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Eselon II	26	8
2.	Eselon III	126	44
3.	Eselon IV	275	259
4.	Jabatan Fungsional	644	2.646
5.	PPPK	39	150

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi, 2024

Tabel 7.4
Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi
Berdasarkan Golongan tahun 2023

No	Jabatan	Tahun 2022	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Golongan I	9	-
2.	Golongan II	262	243
3.	Golongan III	956	2.463
4.	Golongan IV	295	711

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi, 2024

Tabel 7.5
 Jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi
 Yang telah mengikuti diklat kepemimpinan

No	Jabatan	Tahun 2022	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1.	Diklat PIM TK. II	22	7
2.	Diklat PIM TK. III	96	31
3.	Diklat PIM TK. IV	275	259

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi, 2024

C. Organisasi Perempuan

Gerakan Perempuan di Indonesia tumbuh pada awal abad 20 ketika sekolah modern didirikan oleh pemerintah Belanda, dan organisasi modern didirikan oleh “kaoem bumiputera”. Hingga saat ini, Perempuan satu abad lamanya, perjuangan itu mengalami pasang surut. Bahkan apa yang disebut capaian tentang “Hak Perempuan” saat ini, pada prinsipnya belum dapat menjawab problem penindasan yang dialami kaum Perempuan itu sendiri.

Maraknya organisasi Perempuan dalam forum-forum yang berspektif Perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi Perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan Perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi Perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan Perempuan.

Tabel 7.6

Daftar Organisasi Perempuan tergabung dalam GOW Kota Jambi Tahun 2024

NO	ORGANISASI	NAMA KETUA	ALAMAT
1	2	3	4
1	GOW	DR.dr.HJ. Nadiyah, SPoG	Jl. Samarinda No. 01 Kel. Paal Lima Kota Baru - Jambi
2	AISYIYAH	Hj. Amelia	Jl. Pattimura
3	WKRI	Theresia Ari Sukarni	Gereja Khatolik St.Theresia Pasar Jambi
4	PERWARI	Hj. Saodah	Jl. MW Marawis No. 5 Jambi
5	PWKI	Pdm. Herni Lee	Jl. Prabu Siliwangi RT.23 Kel. Tj.Sari
6	IBI	Hj. Nurleli. Am.Keb	Dinas Kesehatan Kota Jambi
7	PERSIT KCK		Kodim 0415 BTH - Simp.Puncak
8	BHAYANGKARI	Ny. Dian Dover	Jl. Bhayangkara No. 01 Kel. Tlg Banjar
9	MUSLIMAT NU	Hj. Mariyatul Qibtiyah, S.Ag	Jl.Kopral Ramli RT.45 Kel. Tlg. Bakung
10	DWP KOTA JAMBI	Hj. Choirianti Budidaya	Jl.Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi
11	Wanita Islam (WI)	Sodriah	Jl.Blekok Raya Handil Jaya (Mesjid Al-Muhajirin)
12	Dharmayukti Karini	Ny. Zakiah Edy Pramono	Jl. A.Yani No.16 Telanaipura
13	Ikatan Adhyaksa Dharmakarini	Ny.Abdiyani F.Azhari	Jl.A.Yani No.15 Telanaipura
14	IWAPI	Hj. Sofia	Lrg. Eksekutif No. 16 Jambi

15	HWK	Yuliantie, SE	Jl.Abdul Rahman Saleh Rt.06 Kel. Pasir Putih
16	AL HIDAYAH	Dra. Hj. Nuraini Usman	Talang Bakung
17	FATAYAT NU	Nurhayati, SPd.I, M.Pd	Jl.Pattimura Komp. Griya Kenali Asri E40 Kenali Besar
18	SALIMAH	Rice Osiarni, S.Pd	Nusa Indah
19	PERIP	Yayuk Sutrisno	Kebun Kopi Jambi
20	HWDI	Dety Herawati, S.Ag	Jl. Sutan Syahrir No.86 RT.11 Kel. Pasir Putih
21	BKMT	Hj. Laksmi	Komplek PU Pasir Putih
22	BKWK	HJ. Farida Usman	Hotel Matahari 2 Pasar Jambi
23	Bundo Kandung	Hj. Leni Suhelmi, M.Pd	Yayasan Al-Progo Jambi
24	MTP IPHI	Hj.Fatmalis Darsyam, SE, M.Si	Jl. Parluhutan Lubis Ir. Gotong Royong
25	PERWIRA	Ade Musdalifa	Depan Polsek Jelutung Jambi
26	IWSS	Hj. Nelly Tansil	Jl. Iswahyudi RT.0 Kel. Pasir Putih
27	KPI	Nuraini Silalahi	Jl. Sayuti Makalam No.75 Rt.10 Kel. Sungai Putri
28	Forsikatel	Marwiyah	Telkom - TAC Jambi
29	Alisa "KHADIOJAH" ICMI	Nina Martini, BBA	Jl. Prabu Siliwangi RT.19 No.51 Kel. Tanjung Sari

30	Perkopin	Sri Wahyuni	Depan Polsek Jelutung Jambi
31	Koperwan	Zubaidah	Jl.H.Juanda No.96 Mayang
32	IPM	Siti Zuraidah	Jl.Pratu Satir The Hok
33	KKJC	Tuti Alawiyah	Jl. Rajawali 2 RT,23 No.37 Kel. Tambak Sari
34	HPMJ	Dora Amelia, Amd	Jl.Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi
35	PDRI	Hj. Sri Artati	
36	WPP PPP	Kartini	JL. TP.Sriwijaya

Sumber : GOW Kota Jambi, 2024

D. Perempuan di Sektor Pertanian

Pertanian masih menjadi sumbermata pencaharianmayoritas Angkatan kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Semua ini berkaitan erat dengan peran, tugas, dan fungsiwanita di pedesaan. Berpedoman kepada pendapatan rumah tangga yang dapat dihasilkan oleh suami maupun istri (pola nafkah ganda), wanitamemiliki peluang kerja yang dapatmenghasilkan pendapatan bagi rumah tangganya, sebagai upayamengurangi kemiskinan di pedesaan. Makalah ini mengemukakan berbagai pemikiran yang memungkinkan berperannya wanita tani sebagai pelaku usaha dan penghasil

pendapatan dalam upaya mencapai ketahanan pangan rumah tangga menuju kesejahteraan keluarga petani di pedesaan.

Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam hubungan sosial bermasyarakat. Peran merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial, yang akhirnya akan memberikan fasilitas tertentu sesuai dengan peranan tersebut. Peran (role) merupakan aspek dinamis dari status, bila mana seseorang telah melakukan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka ia telah berperan. Status sering diakronimkan menjadi kedudukan, yang mengindikasikan posisi seseorang secara sosial dimasyarakat. Dengan kata lain, kedudukan memberikan seseorang sebuah peran sebagai pola interaksi dalam bersosialisasi (bermasyarakat).

Perbedaan status/posisi setiap anggota rumah tangga merupakan pengkajian diferensiasi peranan, berdasarkan perbedaan umur, jenis kelamin, posisi ekonomi, generasi, atau kekuasaan. Perbedaan tersebut merupakan analisis struktural, yang sebagian besar disebabkan oleh alasan biologis dan sosial budaya di lingkungan suatu rumah tangga. Pada dasarnya Wanita memiliki peranan ganda dalam rumah tangga, yang terimplikasi pada (1) peran kerja sebagai ibu rumah tangga (feminine role), yang meski tidak langsung menghasilkan pendapatan namun secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang) dan (2) peran sebagai pencari nafkah (tambahan atau utama).

Pada rumah tangga petani di pedesaan, wanita tani sebagai istri berperan penting karena bertanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengendalikan stabilitas dan kesinambungan hidup keluarga. Pengaturan pengeluaran hidup rumah tangga yang menyangkut kesehatan dan gizi keluarga, Pendidikan anak-anak, dan

kelangsungan hidup dalam masyarakat membutuhkan keterampilan dan pengetahuan home economic. Pada semua strata, jumlah dan curahan waktu/tenaga wanita dalam mengurus kelangsungan rumah tangga lebih tinggi dibanding pria sebagai kepala keluarga.

Tabel 7.7

Perempuan Kota Jambi di Sektor Pertanian Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TAHUN 2023
1	2	3
1	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT)	146
2	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapat bantuan Pemerintah	23
3	Jumlah Anggota Kelompok Tani	6.249
4	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang telah mendapatkan Pelatihan	71

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2024

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu berusaha meningkatkan dan menyempurnakan diri demi tercapainya tujuan bangsa, yaitu mewujudkan negara dengan masyarakat adil, makmur, merdeka, bersatu dengan suatu tatanan kehidupan yang aman, tentram, tertib, damai, sejahtera. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mendasari seluruh ketentuan-ketentuan Hukum di Indonesia, melalui instrumen peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Sebagai faktor penghambat tercapainya tujuan bangsa Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya tindak kejahatan yang mewarnai perjalanan hidup manusia, dan salah satu bentuk kejahatan yang cukup menonjol adalah Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak

kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga),² sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan pengertian kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan.

Sejumlah undang-undang yang mendukung program mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam tataran implementasi, beberapa Keppres dan Inpres juga dikeluarkan untuk mendukung program perlindungan anak yang mencakup Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA).

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung pihak yang berwajib, karena seorang istri takut bercerai dengan suaminya. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang pemerintah dan undang-undang pemerintah

daerah yang memberi perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan kejahatan yang berwajib untuk diselesaikan masalahnya secara hukum. Jenis kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

- a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakerelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain.
- b. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse).
- c. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.
- d. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detail :

- a. kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.
- b. kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
- c. kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:
 - (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tabel 8.1

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Per-Kecamatan
Bulan Januari-Oktober 2024

No	Kecamatan	2024	KDRT				Kekerasan Terhadap Perempuan	Pelecehan/ Kekerasan Terhadap Anak		TPPO	
			Istri	Suami	Anak			L	P	L	P
					L	P					
1	Telanaipura	14	2	0	3	1	4	1	2	0	1
2	Jambi Selatan	15	3	0	1	1	2	3	5	0	0
3	Jambi Timur	15	6	0	0	0	1	2	6	0	0
4	Pasar Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelayangan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	Danau Teluk	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	Kota Baru	23	5	0	2	2	3	4	7	0	0
8	Jelutung	15	3	0	1	1	5	1	4	0	0
9	Alam Barajo	34	4	1	2	4	3	1	4	0	15
10	Paal Merah	21	8	0	1	2	3	1	6	0	0
11	Danau Sipin	9	2	0	1	0	1	2	3	0	0
12	Rujukan Provinsi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total		149	33	1	12	11	22	16	38	0	16

Sumber : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Jambi, 2024

B. Perempuan Kepala Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Keluarga itu terjalin suatu hubungan yang sangat mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa disebut dengan hubungan lahir batin. Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud.

Kepala keluarga dalam kamus bahasa Indonesia ialah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak), kepala keluarga ialah orang yang menjadi pemimpin dalam membina rumah tangga. Seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai kepala keluarga. Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3), "suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Status kepala keluarga dalam keluarga inti yang menganut system patriilineal dipegang oleh ayah, dan sebaliknya pada keluarga yang menganut sistem matrilineal dipegang oleh ibu. Kepala keluarga juga digunakan sebagai satuan dalam sensus untuk perhitungan jumlah keluarga di daerah tertentu.

Seorang pemimpin atau kepala keluarga yang baik tidaklah mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan seluruh anggota keluarganya. Seorang pemimpin selalu tegar dan kuat dalam bertarung dengan semua masalah dan tantangan, karenanya para anggotanya selalu berlindung dibalikinya. Itulah sikap pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang kepala keluarga dalam memimpin bahtera rumah tangga ini.

Peran wanita sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga adalah mendefinisikan bagaimana seorang wanita kepala keluarga yang berperan menjadi orang tua tunggal, yang memimpin suatu keluarga agar terorganisir dalam berkembang dan memeberikan perlindungan terhadap kelurganya dari sagala hal yg dapat membahayakan keluarganya dari segala hal yg tidak diinginkan dapat melaksakan fungsi-fungsi keluarga yang wajib dijalankan dalam sebuah keluarga, fungsi keluarga mencakup lima fungsi yakni fungsi sosialisasi, fungsi edukatif, fungsi keagamaan, fungsi afeksi, dan fungsi ekonomi. Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan di dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat di mana awal kita belajar saat dini dari semua fungsi keluarga itu sendiri dan dalam keluarga, fungsi keluarga sangat berperan dalam perkembangan seorang anak dari usia dini samapai dewasa.

Tabel 8.2

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Jambi Menurut Tahun dan Jenis Kelamin

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2023	158.843	33.699	192.542

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2024

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan dapat disimpulkan :

1. Kota Jambi memiliki komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang menempatkan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai sasaran ke-5 dari misi yaitu: Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan. Bentuk Komitmen dengan terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Jambi
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Capaian IPM Kota Jambi sudah tergolong tinggi dan merupakan angka tertinggi dibanding Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi, capaian IPM Kota Jambi tahun 2024 adalah 81.04.
3. Pada Bidang Pendidikan, Perempuan sudah mendapat kesempatan pendidikan setara dengan laki-laki. Ini dibuktikan pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan di Kota Jambi lebih dari 90 persen.

4. Pada bidang Kesehatan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen memberikan pelayanan prima di setiap fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Jambi, sehingga Angka Harapan Hidup (AHH) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2024 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jambi sebesar 74.85.
5. Pada Sektor Publik yaitu keterwakilan perempuan pada Lembaga legislatif mengalami penurunan di banding jumlah anggota DPRD Kota Jambi yang terpilih pada periode sebelumnya. Pada Pemilu tahun 2024, jumlah Perempuan yang terpilih di DPRD Kota Jambi sebanyak 7 orang, sedangkan pada periode pemilu sebelumnya sebanyak 8 orang.
6. Perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan di Kota Jambi. Umumnya pelaku kekerasan tersebut merupakan orang terdekat dari korban kekerasan.

B. Saran

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi berkomitmen dalam penyediaan dan menyajikan data terpilih serta mendukung upaya keterbukaan informasi publik. Data terpilih sebagai elemen penting yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui data terpilih, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mendukung kepentingan perempuan di Kota Jambi, data gender dapat menjadi salah satu instrument dalam menyusun kebijakan, program maupun kegiatan perangkat daerah Pemerintah Kota Jambi.